

**ANALISIS KARAKTERISTIK DIKLAT TEKNIS SDM PENYELENGGARA UNIT
PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**ANALYSIS OF TECHNICAL TRAINING CHARACTERISTICS HUMAN RESOURCES FOR
VEHICLES WEIGHING OPERATOR UNIT IN PROVINCE OF CENTRAL JAVA**

¹Setio Boedi Arianto dan ²Dwi Heriwibowo

Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta-Indonesia

¹boedi.arianto@gmail.com

²heyree_ltb@yahoo.com

Diterima: 3 Februari 2017, Direvisi: 9 Februari 2017, Disetujui: 22 Februari 2017

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the human resources competency for vehicles weighing operator unit in Central Java Province, using Analysis of Descriptive Qualitative and Quantitative, then conclusions of this study are the characteristics of respondents in Central Java Province based on the age which is more dominant respondents aged > 50 years amounted to 34 people, high school educated/equal as many as 39 people, and the dominant respondent occupations are the traffic controller reached 19 people. Total personnel of Vehicle Weighing Operator Unit in Central Java Province as many as 265 people, 60% have followed technical training and 40% have not follow technical training yet. Based on the number of personnel who have followed technical training (160 people), the personnel who follow technical training weighbridge operator by 24%, while 76% do not follow technical training weighbridge operator. Personnel who follow technical training weighing vehicles by 31%, while 69% do not follow technical training of weighing vehicles. Personnel who follow technical training investigators by 20%, while 80% do not follow technical training investigators. Personnel who follow technical training of transport and traffic by 45%, while 55% did not follow the technical training of transport and traffic. Personnel who follow technical training of andalalin only 1%, while 99% do not follow technical training of andalalin. Personnel who follow the training techniques of informatics/computer by 1%, while 99% did not follow the training techniques of informatics/computer.

Keywords: vehicle weighing operator unit, technical training, weighbridge

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik diklat SDM penyelenggara unit penimbangan kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif maka kesimpulan penelitian ini adalah karakteristik responden di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usia yang lebih dominan adalah responden yang berusia > 50 tahun berjumlah 34 orang, berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 39 orang, dan jabatan responden yang dominan adalah sebagai Pengatur Lalu Lintas berjumlah 19 orang. Jumlah personil Unit Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 265 orang, 60% telah mengikuti diklat teknis dan 40% tidak mengikuti diklat teknis. Berdasarkan jumlah personil yang telah mengikuti diklat teknis (160 orang), personil yang mengikuti diklat teknis operator jembatan timbang sebesar 24%, sedangkan 76% tidak mengikuti diklat teknis operator jembatan timbang. Personil yang mengikuti diklat teknis penimbangan kendaraan bermotor sebesar 31%, sedangkan 69% tidak mengikuti diklat teknis penimbangan kendaraan bermotor. Personil yang mengikuti diklat teknis PPNS sebesar 20%, sedangkan 80% tidak mengikuti diklat teknis PPNS. Personil yang mengikuti diklat teknis transportasi dan lalu lintas sebesar 45%, sedangkan 55% tidak mengikuti diklat teknis transportasi dan lalu lintas. Personil yang mengikuti diklat teknis andalalin hanya 1%, sedangkan 99% tidak mengikuti diklat teknis andalalin. Personil yang mengikuti diklat teknik informatika/komputer sebesar 1%, sedangkan 99% tidak mengikuti diklat teknik informatika/komputer.

Kata Kunci: unit penyelenggara penimbangan kendaraan bermotor, diklat teknis, jembatan timbang

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat melaksanakan peran transportasi dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Terwujudnya pelayanan transportasi yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, sangat ditentukan oleh kualitas SDM sebagai pelaksananya. Menyadari hal tersebut, maka untuk menghasilkan SDM yang profesional dan beretika sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 253 menyebutkan bahwa SDM transportasi perlu dikembangkan kemampuannya (kompetensinya).

Penyediaan dan pengembangan SDM bidang transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah yang dalam penerapannya harus diselenggarakan dengan berpedoman pada azas-azas umum pemerintahan yang baik serta mengedepankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan sektor pembangunan lainnya serta seluruh pemangku kepentingan. Pengembangan SDM bidang transportasi harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah pusat dan daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dituntut perannya untuk menyadarkan para pelaku kegiatan transportasi mengenai pentingnya peningkatan kualitas SDM bidang transportasi. Di sisi lain, perlindungan kerja dan pengaturan kerja bagi SDM bidang transportasi harus terjaga dengan baik agar dalam melaksanakan tugasnya selalu dalam kondisi bugar, mampu berkonsentrasi penuh, serta selalu waspada menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang terburuk tidak terkecuali SDM yang bertugas menangani penimbangan kendaraan bermotor.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi telah diatur secara lengkap, menyeluruh, dan komprehensif mengenai SDM mulai dari penelitian dan pengembangan, perencanaan, pendidikan dan pelatihan, penempatan SDM, perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, waktu kerja, kontribusi penyedia jasa, pembinaan serta sanksi administratif, oleh karena itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik diklat SDM penyelenggara unit penimbangan kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Sumber daya manusia di bidang transportasi, meliputi:

1. sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
3. sumber daya manusia di bidang pelayaran;
4. sumber daya manusia di bidang penerbangan; dan
5. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.

Pada ayat (2) menyebutkan bahwa sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas subbidang lalu lintas jalan, angkutan umum, kendaraan, prasarana lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas jalan. Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa sumber daya manusia di bidang transportasi diselenggarakan melalui kegiatan:

1. penelitian dan pengembangan;
2. perencanaan;
3. pendidikan dan pelatihan;
4. penempatan;
5. perluasan kesempatan kerja;
6. perlindungan kerja dan waktu kerja;
7. pemberian kontribusi oleh penyedia jasa; dan
8. pembinaan.

B. Pengertian Umum

1. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut Diklat Transportasi adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
4. Jalur Diklat adalah wahana yang dilalui peserta diklat untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan pelatihan.
5. Jenjang Diklat adalah tahapan pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan

- tugas keprofesionalannya. Kompetensi diperoleh dengan mengikuti Diklat Transportasi sesuai dengan jalur dan jenjang Diklat Transportasi baik melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 8. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
 9. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
 10. Pengujian tipe kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
 11. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau keseluruhannya untuk mengangkut barang.

C. Studi Sebelumnya

Studi Penyusunan Jabatan Fungsional Lalu Lintas Angkutan Jalan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1993) menyatakan bahwa standar kompetensi pegawai di jembatan timbang adalah melakukan pengendalian di jembatan timbang meliputi:

1. Mengatur pergerakan kendaraan di jembatan timbang.
2. Melakukan persiapan, pemeriksaan dan kalibrasi alat jembatan timbang:
 - a. jembatan timbang konvensional,
 - b. jembatan timbang sistem komputer.
3. Mencatat data pemeriksaan kendaraan di:
 - a. jembatan timbang konvensional,
 - b. jembatan timbang sistem komputer.
4. Mengolah data pengukuran kendaraan.
5. Menganalisis kecenderungan Muatan Sumbu Terberat (MST) yang ada di jalan dan pelanggaran MST, dimana MST adalah beban gandar maksimum yang diijinkan pada jalan raya. MST dipakai sebagai dasar hukum (legal aspek) dalam pengendalian dan pengawasan muatan kendaraan di jalan dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Mengevaluasi dan menyusun rekomendasi tentang penanganan pelanggaran Muatan Sumbu Terberat (MST).

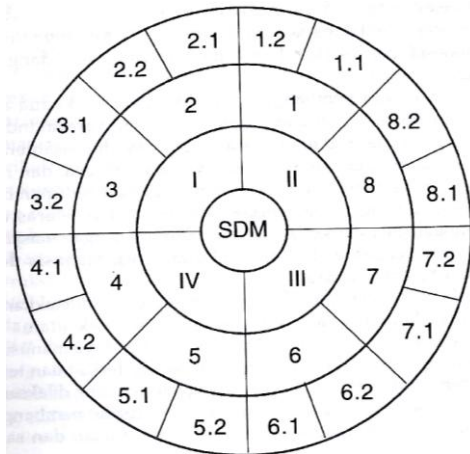
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan Model Integratif Siklus Multi Dimensional SDM. Menurut Oemar Hamalik (2000) model ini memuat hal-hal sebagai berikut:

1. SDM dilihat dari empat dimensi hubungan, yakni hubungan dengan sesamanya, atau hubungan dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Karakteristik kualitas SDM mencakup delapan aspek: kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan, mental psikologis, sosial budaya, pelestarian lingkungan, ketahanan dan kemanan.
3. Berdasarkan karakteristik tersebut, secara spesifik kualitas SDM memiliki atribut-atribut sebagai berikut:
 - a. memiliki kesehatan jasmani dan kesehatan rohani,
 - b. memiliki kecukupan dalam bidang materiil-finansial, dan pekerjaan/mata pencaharian tertentu,
 - c. memiliki kemampuan profesional dan kepribadian yang baik,
 - d. menghayati dan mengamalkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama yang dianutnya,
 - e. memiliki mental kemandirian dan inovatif/maju,
 - f. memiliki kemampuan mendayagunakan dan/atau menciptakan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan bertindak berlandaskan sistem nilai dan moral etika bangsa,

- g. memiliki kemampuan melestarikan dan mendayagunakan bioekologi dan geokologi secara baik dan benar, dan
- h. memiliki ketahanan dan ketangguhan serta membina keselamatan dan rasa aman yang mantap.



Sumber: Oemar Hamalik, 2000

Gambar 1.
Model Integratif Siklus Multi Dimensional
SDM.

B. Alur Pikir Penelitian

Tahapan proses dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi peraturan perundangan yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang menangani unit penimbangan kendaraan bermotor. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder yang selanjutnya dilakukan pengolahan data sebagai bahan analisis sehingga dapat dibuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2006), teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data, peneliti memerlukan instrumen yaitu alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah.

1. Data Primer

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 2002). Wawancara merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau

keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan sampel.

Dalam penelitian dikenal teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Hariwijaya, 2007). Teknik ini biasanya melekat erat dengan penelitian kualitatif.

Menurut Musta'in Mashud (2005), secara umum wawancara dibagi menjadi dua sesuai standarisasinya yaitu wawancara berencana dan tidak berencana. Wawancara berencana biasanya telah disiapkan model-model pertanyaan yang pasti berupa kuesioner yang telah secara sistematis disusun sedemikian urutan. Kuesioner tersebut nantinya diajukan kepada para responden dengan cara bisa melalui wawancara yang dalam hal ini sifatnya tertutup karena pewawancara tidak diperkenankan mengembangkan pertanyaan dan menanyakan persis dengan apa yang ada dikuesioner atau bisa juga dengan menyodorkan lembaran kuesioner dan membiarkan responden menjawab. Dalam hal ini jelas tujuannya adalah mencari keseragaman jawaban karena pertanyaan sifatnya pakem dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Model seperti ini seringkali digunakan dalam riset yang bersifat menguji hipotesis. Sebaliknya, wawancara yang tidak terencana tidak memiliki persiapan susunan yang mendasar. Model ini memungkinkan penanya mengembangkan pertanyaan secara spontanitas namun tidak asal-asalan.

Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari

pertanyaan *multiple*, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum *building rapport*, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif. Selain itu, ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan untuk menjadi pewawancara yang baik, yaitu jujur, mempunyai minat, berkepribadian dan tidak temperamental, adaptif, akurasi, dan berpendidikan (Moser & Kalton dalam Musta'in Mashud dalam Bagong dan Sutinah, 2005).

b. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap dan biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban (kuesioner tertutup) atau memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas (kuesioner terbuka).

Penyebaran kuesioner dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penyerahan kuesioner secara pribadi, melalui surat, dan melalui *email*. Masing-masing cara ini memiliki kelebihan dan kelemahan, seperti kuesioner yang diserahkan secara pribadi dapat membangun hubungan dan memotivasi responden, lebih murah jika pemberiannya dilakukan langsung dalam satu kelompok, respon cukup tinggi. Namun kelemahannya adalah organisasi kemungkinan menolak memberikan waktu perusahaan untuk survei dengan kelompok karyawan yang dikumpulkan untuk tujuan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam melakukan penelitian ini, data sekunder yang dibutuhkan yaitu struktur organisasi Unit Pelaksana Penimbangan (UPPKB), jumlah jembatan timbang, dan jumlah SDM UPPKB.

D. Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif (Statistik Deskriptif Sederhana)

Metode analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu obyek dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005).

Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dengan menggunakan kalimat, sehingga lebih informatif dan mudah dipahami.

Lexy J. Moloeng (2004) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Nasution (2003), penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, karena dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam *setting* latar yang alamiah atau natural.

Analisis deskriptif kuantitatif (statistik sederhana misalnya **Tabel 1** dan *bar chat* pada **Gambar 3-9**) adalah analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dengan menggunakan angka-angka, sehingga lebih mudah dipahami dan dimengerti.

Menurut Sugiyono (2010), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara *random*, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas nilai (*value free*). Dengan kata lain, penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. Objektivitas itu diperoleh antara lain melalui penggunaan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Peneliti yang melakukan studi kuantitatif mereduksi sedemikian rupa hal-hal yang dapat membuat bias, misalnya akibat masuknya persepsi dan nilai-nilai

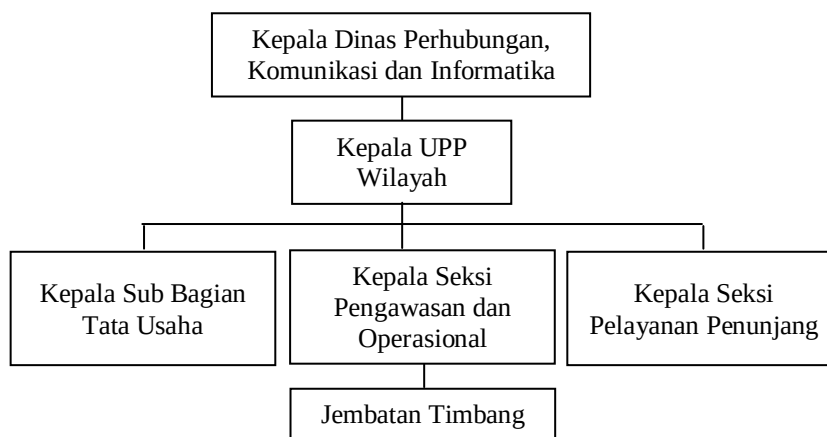
pribadi. Jika dalam penelaahan muncul adanya bias itu maka penelitian kuantitatif akan jauh dari kaidah-kaidah teknik ilmiah yang sesungguhnya (Sudarwan Danim, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Organisasi UPPKB Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah berada di

bawah pengawasan Unit Pelaksana Perhubungan (UPP) yang berjumlah 10 (sepuluh) UPP, yaitu UPP Wilayah Magelang, UPP Wilayah Pati, UPP Wilayah Pekalongan, UPP Wilayah Kebumen, UPP Wilayah Salatiga, UPP Wilayah Surakarta, UPP Wilayah Banyumas, UPP Wilayah Tegal, UPP Wilayah Semarang, dan UPP Wilayah Wonogiri, dengan jumlah jembatan timbang sebanyak 17 (tujuh belas) unit.



Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, 2016, diolah

Gambar 2.

Struktur Organisasi Penyelenggara Jembatan Timbang di Provinsi Jawa Tengah.

B. Jumlah Jembatan Timbang di Provinsi Jawa Tengah

Jembatan timbang yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 17 (tujuh belas) unit, dari jumlah tersebut 1 (satu) jembatan timbang

telah ditutup pada tahun 2010 yaitu Jembatan Timbang Tugu yang terletak di Jl. Semarang-Kendal, jembatan timbang yang masih beroperasi dan tidak beroperasi saat ini masing-masing 8 (delapan) unit.

Tabel 1.

Data Jembatan Timbang di Provinsi Jawa Tengah

No.	Jembatan Timbang	Kota/Kabupaten	Pelayanan	Platfom (ton)	Status
1.	JT. Klepu	Semarang	1 Arah	50	Beroperasi
2.	JT. Sambong	Blora	2 Arah	50	Beroperasi
3.	JT. Wanareja	Cilacap	2 Arah	80	Beroperasi
4.	JT. Banyudono	Boyolali	1 Arah	50	Tidak Beroperasi
5.	JT. Aji Barang	Banyumas	2 Arah	50	Tidak Beroperasi
6.	JT. Tugu	Semarang	1 Arah	50	Tutup (2010)
7.	JT. Pringsurat	Temanggung	1 Arah	50	Tidak Beroperasi
8.	JT. Salam	Magelang	2 Arah	50	Beroperasi
9.	JT. Lebuawu	Jepara	2 Arah	50	Tidak Beroperasi
10.	JT. Gubug	Purworejo	2 Arah	80	Tidak Beroperasi
11.	JT. Selogiri	Wonogiri	2 Arah	50	Beroperasi
12.	JT. Tanjung	Brebes	1 Arah	80	Beroperasi
13.	JT. Subah	Batang	1 Arah	80	Tidak Beroperasi
14.	JT. Sarang	Rembang	1 Arah	80	Beroperasi
15.	JT. Toyogo	Sragen	1 Arah	80	Beroperasi
16.	JT. Butuh	Purworejo	2 Arah	80	Tidak Beroperasi
17.	JT. Katonsari	Demak	1 Arah	80	Tidak Beroperasi

Sumber: Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah, 2016 (diolah)

C. Jumlah SDM UPPKB Provinsi Jawa Tengah

Jumlah SDM pada Unit Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) berdasarkan data dari Dishubkomininfo Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 adalah 265 orang yang tersebar di 9 (sembilan) UPP dengan perincian sebagai berikut:

1. UPP Semarang	=	34 orang
2. UPP Pati	=	38 orang
3. UPP Tegal	=	32 orang
4. UPP Magelang	=	32 orang
5. UPP Surakarta	=	32 orang
6. UPP Wonogiri	=	30 orang
7. UPP Salatiga	=	34 orang
8. UPP Kebumen	=	32 orang
9. UPP Banyumas	=	1 orang
Jumlah	=	265 orang

D. Karakteristik Responden

Berdasarkan 265 SDM Unit Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Provinsi Jawa Tengah, terdapat 160 orang yang telah mengikuti diklat teknis dan lebih kurang 30 persennya atau sebanyak 62 (enam puluh dua orang) dari 9 UPP di Jawa Tengah telah diambil sebagai sampel dalam wawancara tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

1. Responden di Provinsi Jawa Tengah yang berusia < 20 tahun sebanyak 1 orang, antara 31 - 40 tahun berjumlah 4 orang, antara 41 - 50 tahun sebanyak 23 orang, dan > 50 tahun berjumlah 34 orang.
2. Responden di Provinsi Jawa Tengah yang berpendidikan SMA/Sederajat berjumlah 39 orang, S1 sebanyak 18 orang, S2 berjumlah 2 orang, dan lainnya 3 orang.
3. Jabatan Responden di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor 2 orang, PPNS di Bidang LLAJ 18 orang, Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor 13 orang, Penguji Kendaraan

Bermotor 6 orang, Petugas Pencatatan Penerimaan, Penyimpanan, Inventarisasi dan Pengeluaran Barang 4 orang, serta Pengatur Lalu Lintas 19 orang.

E. Persepsi Responden

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi UPPKB, seluruh responden di Provinsi Jawa Tengah sudah memahami, sudah tertuang menjadi dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP), dan SOP tersebut mudah dipahami oleh seluruh petugas jembatan timbang.

Persepsi responden di Provinsi Jawa Tengah menurut kesesuaian tugas dengan kompetensi, 50 orang mengatakan sudah sesuai, 3 orang mengatakan belum sesuai, 5 orang mengatakan sedang dilakukan penataan SDM, dan 4 orang tidak menjawab.

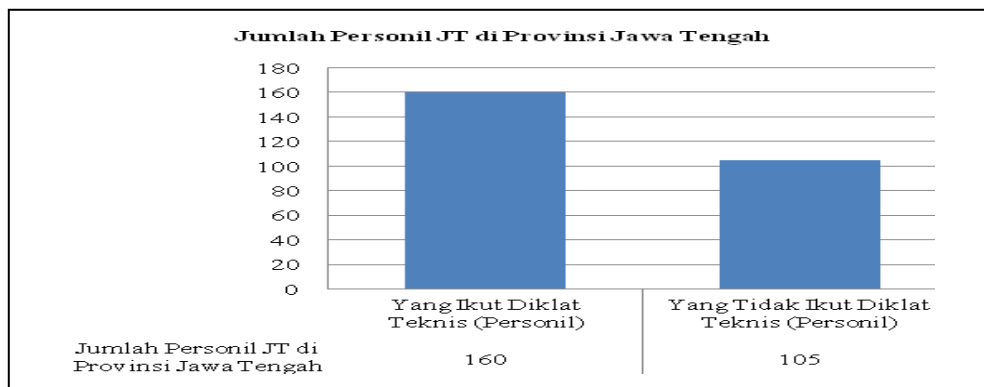
Responden di Provinsi Jawa Tengah yang pernah mengikuti diklat manajemen operasional unit pelaksana penimbangan sebanyak 48 orang, 10 orang tidak pernah mengikuti, dan 4 orang tidak menjawab.

Responden di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sertifikat lulus uji kompetensi manajemen operasional unit pelaksana penimbangan sebanyak 37 orang, 14 orang tidak memiliki, dan 11 orang tidak menjawab.

Responden di Provinsi Jawa Tengah yang pernah mengikuti diklat penyegaran manajemen operasional unit pelaksana penimbangan sebanyak 36 orang, yang tidak pernah mengikuti berjumlah 18 orang, dan 8 orang tidak menjawab.

F. Analisis

Jumlah personil jembatan timbang di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 265 orang, terdiri atas 160 orang telah mengikuti diklat teknis dan 105 orang tidak mengikuti diklat teknis. Kondisi ini menggambarkan bahwa 60% personil jembatan timbang di Provinsi Jawa Tengah telah mengikuti diklat teknis.



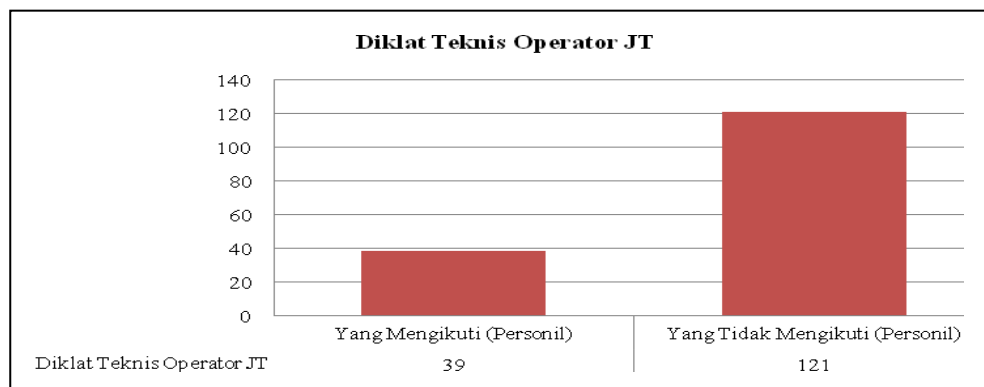
Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 3.

Jumlah Personil Jembatan Timbang di Provinsi Jawa Tengah yang Telah Mengikuti Diklat Teknis dan Personil yang Tidak Mengikuti Diklat Teknis.

Berdasarkan jumlah personil yang telah mengikuti diklat teknis (160 orang), personil yang mengikuti diklat teknis operator jembatan timbang sebanyak 39 orang, sedangkan 121 orang tidak mengikuti diklat teknis operator

jembatan timbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa 24% personil jembatan timbang di Provinsi Jawa Tengah telah mengikuti diklat teknis operator jembatan timbang.



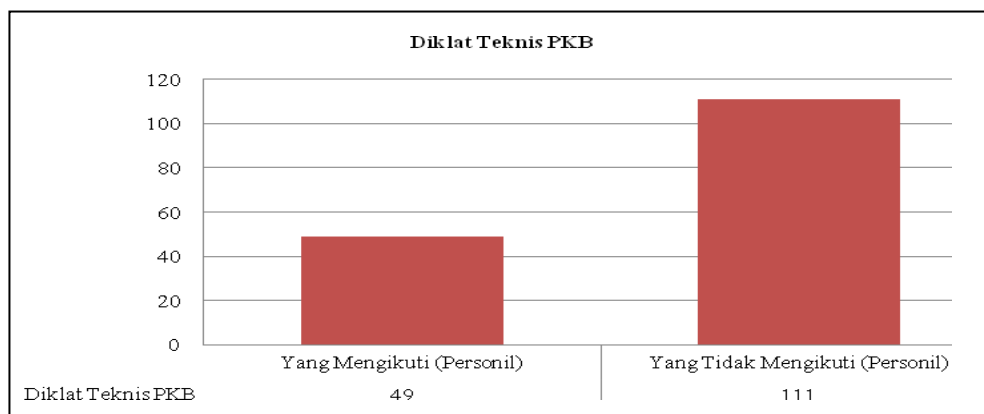
Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 4.

Jumlah Personil Jembatan Timbang di Provinsi Jawa Tengah yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Operator Jembatan Timbang.

Berdasarkan 160 orang yang telah mengikuti diklat teknis, personil yang mengikuti diklat teknis penimbangan kendaraan bermotor sebanyak 49 orang, sedangkan 111 orang tidak mengikuti diklat teknis penimbangan kendaraan

bermotor. Kondisi ini menggambarkan bahwa 31% personil jembatan timbang di Provinsi Jawa Tengah telah mengikuti diklat teknis PKB.



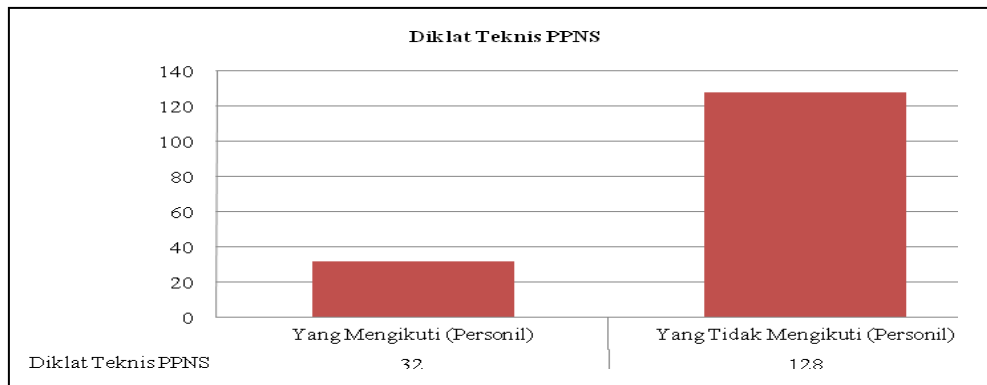
Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 5.

Jumlah Personil Jembatan Timbang di Provinsi Jawa Tengah yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan jumlah personil yang telah mengikuti diklat teknis (160 orang), personil yang mengikuti diklat teknis PPNS sebanyak 32 orang, sedangkan 128 orang tidak mengikuti

diklat teknis PPNS. Kondisi ini menunjukkan bahwa 20% personil jembatan timbang di Provinsi Jawa Tengah telah mengikuti diklat teknis PPNS.



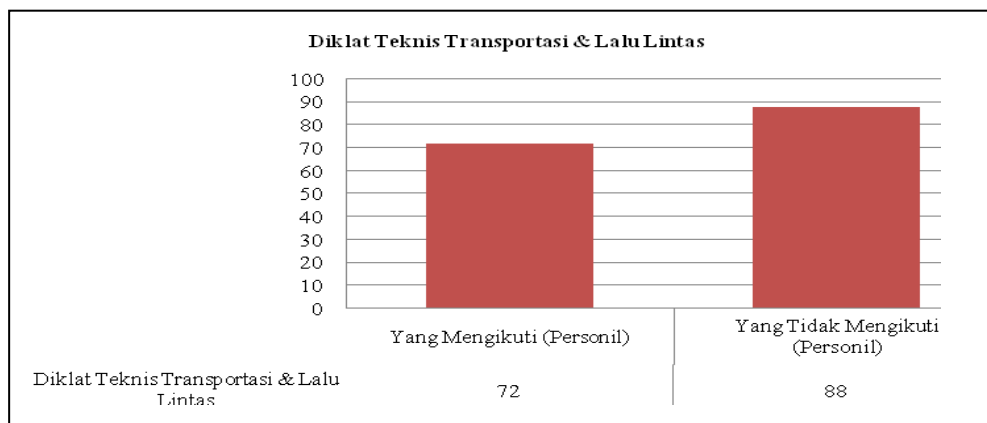
Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 6.

Jumlah Personil Jembatan Timbang di Provinsi Jawa Tengah yang Telah Mengikuti Diklat Teknis PPNS.

Berdasarkan 160 orang yang telah mengikuti diklat teknis, personil yang mengikuti diklat teknis transportasi dan lalu lintas sebanyak 72 orang, sedangkan 88 orang tidak mengikuti diklat teknis transportasi dan lalu lintas. Kondisi

ini menggambarkan bahwa 45% personil jembatan timbang di Provinsi Jawa Tengah telah mengikuti diklat teknis transportasi dan lalu lintas.



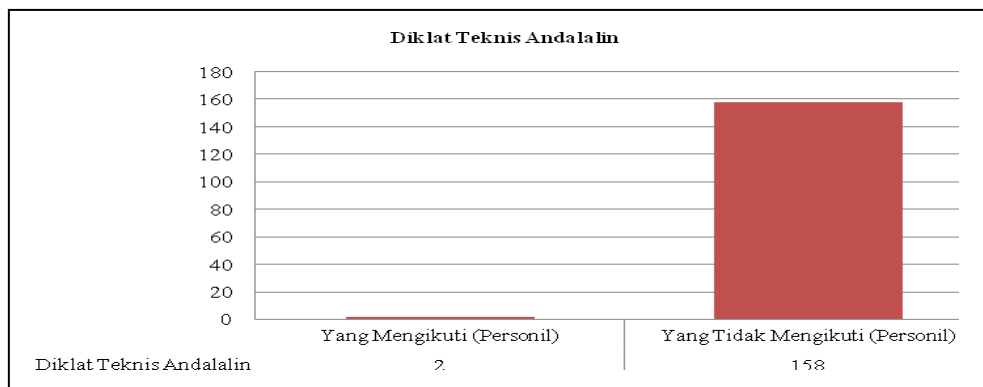
Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 7.

Jumlah Personil Jembatan Timbang di Provinsi Jawa Tengah yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Transportasi dan Lalu Lintas.

Berdasarkan jumlah personil yang telah mengikuti diklat teknis (160 orang), personil yang mengikuti diklat teknis andalalin sebanyak 2 orang, sedangkan 158 orang tidak mengikuti.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sedikit personil jembatan timbang di Provinsi Jawa Tengah yang telah mengikuti diklat teknis andalalin.

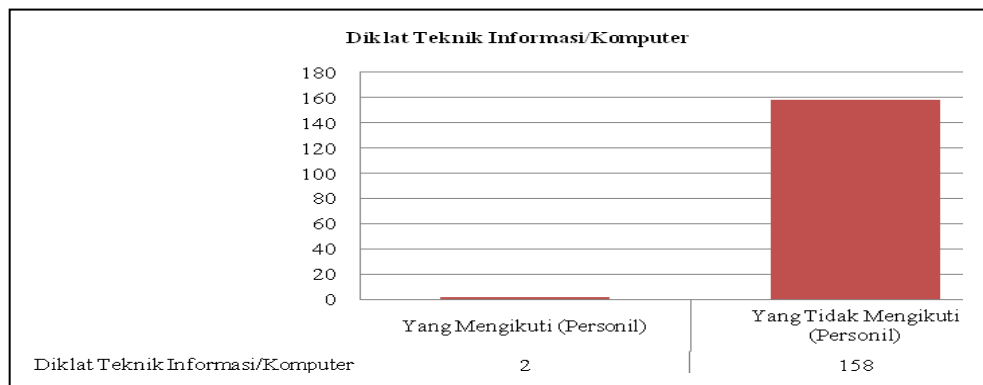


Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 8.
Jumlah Personil Jembatan Timbang di Provinsi Jawa Tengah yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Andalalin.

Berdasarkan 160 orang yang telah mengikuti diklat teknis, personil yang mengikuti diklat teknik informatika/komputer sebanyak 2 orang, sedangkan 158 orang tidak mengikuti diklat teknik informatika/komputer. Kondisi

ini menggambarkan bahwa personil jembatan timbang di Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti diklat teknik informatika/komputer masih sedikit sekali.



Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 9.
Jumlah Personil Jembatan Timbang di Provinsi Jawa Tengah yang Telah Mengikuti Diklat Teknik Informatika/Komputer.

KESIMPULAN

Karakteristik responden di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usia yang lebih dominan adalah responden yang berusia > 50 tahun berjumlah 34 orang, berpendidikan SMA/Sederajat berjumlah 39 orang, dan jabatan responden sebagai Pengatur Lalu Lintas 19 orang. Jumlah personil jembatan timbang di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 265 orang, 60% telah mengikuti diklat teknis dan 40% tidak mengikuti diklat teknis. Berdasarkan jumlah personil yang telah mengikuti diklat teknis (160 orang), personil yang mengikuti diklat teknis operator jembatan timbang sebesar 24%, sedangkan 76% tidak mengikuti diklat teknis operator jembatan timbang. Personil yang mengikuti diklat teknis penimbangan kendaraan bermotor sebesar 31%, sedangkan 69% tidak mengikuti diklat teknis penimbangan kendaraan bermotor. Personil yang mengikuti diklat teknis PPNS sebesar 20%, sedangkan 80% tidak mengikuti diklat teknis PPNS. Personil yang mengikuti diklat teknis transportasi dan lalu lintas sebesar 45%, sedangkan 55% tidak

mengikuti diklat teknis transportasi dan lalu lintas. Personil yang mengikuti diklat teknis andalalin hanya 1%, sedangkan 99% tidak mengikuti diklat teknis andalalin. Personil yang mengikuti diklat teknik informatika/komputer sebesar 1%, sedangkan 99% tidak mengikuti diklat teknik informatika/komputer.

SARAN

Perlu penjabaran uraian jabatan yang disesuaikan dengan jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Perlu menyusun kebutuhan SDM untuk masa yang akan datang sesuai dengan jabatan yang ditetapkan dan standar kompetensinya. Perlu menyusun daftar prioritas keikutsertaan dalam diklat, terutama diklat yang menjadi wajib untuk diikuti bagi personil jembatan timbang. SDM yang sudah mengikuti diklat manajemen UPPKB segera diikutsertakan untuk mengikuti seleksi kompetensi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, serta para peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. 2016. *Laporan Tahunan 2015*. Semarang.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1993. *Studi Penyusunan Jabatan Fungsional Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Jakarta.
- Esterberg, Kristin G. 2002. *Qualitative Methods in Social Research*. New York: McGraw-Hill Higher Education.
- Hamalik, Oemar. 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan: Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariwijaya, M. 2007. *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: elMatera Publishing.
- Mashud, Musta'in. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nazir, M. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi. Jakarta.

